



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIK ANUGRAHANI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 237568

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/340 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 320.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SPM MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 17.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 319.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.107.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.107.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.